

# IMPLEMENTASI KEBIJAKAN MITIGASI OLEH BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH BAGI MASYARAKAT TERDAMPAK BANJIR DI KABUPATEN SUPIORI PROVINSI PAPUA

Hendrik Kristian Rumaseuw

NPP. 29.1259

*Asdaf Kabupaten Mappi Provinsi Papua*

*Program Studi Manajemen Keamanan dan Keselamatan Publik*

Email: Hendrikris392@gmail.com

## ABSTRACT

**Problem Statement/Background (GAP):** People in Supiori Regency, Papua Province still do not understand about flood disaster prevention. This of course should be a concern of the government given the high risk caused by floods. In this case, the role of the Regional Disaster Management Agency (BPBD) is very much needed in the implementation of disaster management in the region. **Objective:** **Purpose:** This study aims to determine the implementation of the policy along with the inhibiting factors and the efforts made in the mitigation policy by the Regional Disaster Management Agency (BPBD) for flood-affected communities in Supiori Regency, Papua Province. **Method:** This study uses a qualitative approach with a descriptive method through an inductive approach. Sources of data were obtained using interview, observation and documentation data collection techniques. Data analysis techniques used are data reduction, data presentation, and data verification. This study uses an analysis of the theory of policy implementation by Van Meter and Horn (1975). **Result:** Implementation of the Flood Disaster Mitigation Policy by BPBD in Syurdori Village, Supiori Regency has not run optimally, there are still problems and obstacles faced in its implementation. In the aspect of mitigation, prevention, the flood disaster still encountered problems such as the implementation of socialization and education about flood disaster mitigation, making disaster-prone maps, especially flood disasters, carrying out routine monitoring that has not been seen by the community and preparedness training has not been felt by the community so that disaster prevention and management has not yet been implemented. felt completely by the community, lack of personnel, inadequate equipment, coordination with the community has not been carried out, there are still many that have not been done to repair the sewers. **Conclusion:** The implementation of the Flood Disaster Mitigation Policy by BPBD Syurdori Village, Supiori Regency is still not optimal and has not been able to overcome the problem so that it is almost completely not felt by the community. In order to improve the implementation of mitigation, more practical socialization is needed, routine monitoring, preparedness training, infrastructure facilities, and improving coordination and communication between the government and the community.

**Keywords:** Implementation, Mitigation Policy, Regional Disaster Management Agency (BPBD)

## ABSTRAK

**Permasalahan/Latar Belakang (GAP):** Masyarakat di Kabupaten Supiori Provinsi Papua masih belum memahami tentang pencegahan bencana banjir. Hal ini tentu harus menjadi perhatian pemerintah mengingat tingginya resiko yang diakibatkan oleh bencana banjir. Dalam hal ini, peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) sangat dibutuhkan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah. **Tujuan:** Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi kebijakan beserta faktor penghambat dan upaya yang dilakukan dalam kebijakan mitigasi oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) bagi masyarakat terdampak banjir di Kabupaten Supiori Provinsi Papua. **Metode:** Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif melalui pendekatan induktif. Sumber data diperoleh menggunakan teknik pengumpulan data wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah reduksi data, penyajian data, dan verifikasi data. Penelitian ini menggunakan analisis teori implementasi kebijakan Van Meter dan Horn (1975). **Hasil/Temuan:** Implementasi Kebijakan Mitigasi Bencana Banjir oleh BPBD di Desa Syurdori Kabupaten Supiori belum berjalan dengan maksimal, masih terdapat permasalahan dan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan tersebut. Pada aspek mitigasi, pencegahna, bencana banjir tersebut masih ditemui permasalahan seperti pelaksanaan sosialisasi dan edukasi tentang mitigasi bencana banjir, pembuatan peta rawan bencana khususnya bencana banjir, pelaksanaan pemantauan rutin yang belum tampak oleh masyarakat serta pelatihan kesiapsiagaan belum dirasakan masyarakat sehingga pencegahan dan penanganan bencana belum dirasakan seutuhnya oleh masyarakat, kurangnya personil, peralatan belum memadai, koordinasi dengan masyarakat belum berjalan, masih banyak yang belum dilakukan perehapan saluran pembuangan. **Kesimpulan:** Implementasi Kebijakan Mitigasi Bencana Banjir oleh BPBD Desa Syurdori Kabupaten Supiori masih belum optimal serta belum bisa mengatasi permasalahannya sehingga hampir sama sekali tidak dirasakan oleh masyarakat. Guna meningkatkan implementasi mitigasi diperlukan sosialisasi yang lebih praktis, pemantauan rutin, pelatihan kesiapsiagaan, sarana prasarana, dan meningkatkan koordinasi dan komunikasi pemerintah dengan masyarakat.

**Kata kunci:** Implementasi, Kebijakan Mitigasi, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)

## I. PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Secara geografis Indonesia terletak diantara lempeng Indo-Australia dengan Lempeng Eurasia kemudian Lempeng Eurasia dengan Lempeng Pasifik. Pertemuan antar lempeng ini menyebabkan Indonesia memiliki tingkat kerawanan terhadap bencana yang tinggi. Ancaman bencana juga meningkat akibat dari Kerusakan lingkungan, pemborosan, penebangan pohon di hutan secara liar dan pembuangan limbah dengan sengaja maupun disengaja dapat menyebabkan kerusakan lingkungan dan pelaksanaan pemakaian berbagai sumber daya alam yang berlebihan dikarenakan beberapa pihak yang tidak bertanggung jawab akibatnya kejadian bencana selalu meningkat. Bencana merupakan suatu peristiwa yang bergerak lambat atau peristiwa yang selalu bersifat mengancam dan juga bisa mengganggu kehidupan manusia serta menyebabkan kerugian manusia, lingkungan, harta benda, dan mengarah pada konsekuensi psikologis. Sebagian besar wilayah Indonesia rentan terhadap berbagai bencana, terutama yang berpotensi terkena bencana alam seperti



gempa bumi, tsunami, letusan gunung berapi, tanah longsor dan banjir. Salah satu bencana yang paling sering terjadi dan serius di Indonesia adalah bencana banjir.

Banjir adalah salah satu bencana alam yang terjadi ketika aliran air yang berlebihan dengan kapasitas tinggi melanda suatu negara. Banjir disebabkan oleh keluarnya air dari sungai, seperti sejumlah besar air yang meluap ke permukaan yang besar seperti sungai dan danau, atau mengalir keluar dari bendungan. Ukuran danau dan permukaan air terus berubah karena curah hujan yang tinggi dan pencairan musiman, tetapi banjir yang terjadi tidak begitu besar kecuali air mencapai daerah yang digunakan oleh orang-orang, seperti desa seperti kota dan kota. Banjir juga dapat terjadi di sungai, terutama di parit sungai, ketika limpasan melebihi kapasitas saluran air. Banjir sering merusak rumah dan bisnis yang dibangun di dataran banjir alami. Kerusakan akibat banjir dapat dihindari dengan menjauh dari sungai dan badan air lainnya, tetapi orang-orang tinggal di dekat air, bekerja dan mendapatkan uang, dan memanfaatkan biaya rendah, perjalanan mudah, dan perdagangan yang ditawarkan air. Pemukiman penduduk yang terus berlanjut di daerah rawan banjir adalah bukti bahwa tetap dekat dengan air melebihi biaya kerusakan banjir normal. Banjir sangat berbahaya, terutama karena berdampak signifikan terhadap ekonomi, kesehatan, lingkungan, dan masyarakat.

Dampak banjir dinilai sangat meresahkan masyarakat karena menimbulkan kerusakan dan kerugian yang cukup serius di berbagai daerah dan menghambat segala aktivitas. Salah satu daerah yang terkena bencana banjir di Indonesia yakni Kabupaten Supiori Provinsi Papua. Wilayah Kabupaten Supiori terutama berada di Pulau Supiori dan beberapa di Pulau Biak. Wilayah ini merupakan area yang bergunung-gunung, dengan hanya daerah-daerah tertentu yang datar atau landai. Daerah dataran dan miring tersebar di sepanjang pantai. Di kawasan dataran dan landai ini, masyarakat mendirikan pemukiman, kebun, peternakan dan kegiatan ekonomi lainnya. Wilayah Kabupaten Supiori terletak di perairan Pasifik, dan angin kencang serta hujan lebat dapat mengubah iklim setiap saat. Dikelilingi oleh sungai-sungai di daerah pesisir dan daerah pegunungan, sering menjadi sasaran banjir. Untuk menghindari permasalahan bencana dan meminimalisir jumlah korban, diperlukan Tindakan mitigasi diperlukan dalam melakukan pencegahan terjadinya bencana. Masyarakat perlu berpartisipasi dalam membantu pelaksanaan penanggulangan bencana untuk menghindari berbagai jenis bencana yang menghambat laju pembangunan Masyarakat perlu menyadari bahwa pada dasarnya semua jenis bencana dapat terjadi. Sebagian besar masyarakat juga belum sadar bahwa selama ini bencana yang terjadi merupakan akibat dari ulah dan perbuatan masyarakat itu sendiri.

## **1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)**

Ada beberapa permasalahan berkaitan dengan implementasi kebijakan mitigasi oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah bagi masyarakat terdampak banjir di Kabupaten Supiori Provinsi Papua. Pemukiman penduduk yang terus berlanjut di daerah rawan banjir adalah bukti bahwa tetap dekat dengan air melebihi biaya kerusakan banjir normal. Banjir sangat berbahaya, terutama karena berdampak signifikan terhadap ekonomi, kesehatan, lingkungan, dan masyarakat. Dampak banjir dinilai sangat meresahkan masyarakat karena menimbulkan kerusakan dan kerugian yang cukup serius di berbagai daerah dan menghambat segala aktivitas. Berdasarkan data yang didapatkan penulis, bencana banjir yang terjadi di Kabupaten Supiori sejauh ini belum mengakitbankan adanya korban jiwa namun banjir menyebabkan banyak kerugian. Bencana banjir pada 05 juli 2022 menyebabkan 151 jiwa mengungsi dan kerugian berupa 45 unit rumah warga terendam, 1 unit kantor desa terendam, 25 unit pompa air rusak, dan 25 unit sumur air bersih menjadi kotor

(Pusdalops BPBD Prov. Papua). Banjir ini disebabkan intensitas curah hujan yang tinggi dan belum adanya drainase pembuangan air sehingga air hujan yang turun tergenang dan menyebabkan banjir. Pemerintah daerah perlu menanggulangi bencana banjir di Kabupaten Supiori dalam rangka perlindungan dan keamanan bagi masyarakat, dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana pemerintah daerah melalui BPBD dapat membuat serangkaian upaya dalam penyelenggaraan bencana demi menekan angka korban jiwa dan kerugian material yang disebabkan oleh bencana banjir yang terjadi di Kabupaten Supiori.

Masyarakat perlu menyadari bahwa pada dasarnya semua jenis bencana terjadi. Sebagian besar masyarakat tidak sadar bahwa selama ini bencana yang terjadi merupakan akibat dari ulah dan perbuatan masyarakat itu sendiri yang setiap saat beraktivitas dan merusak lingkungan yang mereka tempati. Tindakan mitigasi diperlukan dalam melakukan pencegahan terjadinya bencana. Masyarakat perlu berpartisipasi dalam membantu pelaksanaan penanggulangan bencana untuk menghindari berbagai jenis bencana yang menghambat laju pembangunan. Masyarakat membutuhkan perlindungan dan kenyamanan dari kebijakan mitigasi yang dilakukan Pemerintah daerah melalui BPBD Kabupaten Supiori dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah. Perlindungan dan kepedulian yang dimunculkan pemerintah daerah terhadap masyarakat terkait bahaya bencana banjir pada wilayah terdampak banjir dengan program kebijakan yang dibuat dalam meningkatkan kapasitas kemampuan dan pengetahuan masyarakat untuk selalu sigap dan tanggap cepat ketika menghadapi bencana banjir.

### **1.3. Penelitian Terdahulu**

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu, baik dalam konteks implementasi kebijakan maupun konteks mitigasi bencana banjir. Penelitian Pratama Gunawan (2017) yang berjudul analisis penanggulangan bencana banjir oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bengkulu (Gunawan:2017) menunjukkan bahwa Pemantauan terhadap kawasan bencana banjir oleh satgas bencana BPBD dan dilakukan pemantauan rutin 3 kali dalam 1 bulan oleh BPBD (Gunawan:2017). Penelitian Nurromansyah Novan Afrizal dan Setyono Sih Jawoto (2014) yang berjudul perubahan kesiapsiagaan masyarakat DAS beringin Kota Semarang dalam menghadapi ancaman banjir bandang (Afrizal & Jawoto; 2014) menemukan bahwa dalam ancaman banjir aspek Pengetahuan Prabencana belum begitu mengerti mengenai upaya kesiapsiagaan serta aspek pengetahuan mitigasi berupa tindakan mitigasi secara struktural (Afrizal & Jawoto; 2014). Penelitian Alfian Fahru Lukito yang berjudul Mitigasi Bencana Banjir di Desa Ngrombo Kecamatan Baji Kabupaten Sukoharjo (Lukito;2014) menemukan bahwa 1) Bahwa bentuk-bentuk mitigasi struktural yang terdapat pada Masyarakat Desa Ngrombo, Kecamatan Baki, Kabupaten Sukoharjo adalah pembangunan Tanggultanggung di bantaran sungai Bengawan Solo yang di buat oleh Pemerintah Pengerukan muara sungai dan pembersihan saluran-saluran air oleh masyarakat Desa yang bekerja sama dengan Pemerintah yang dilakukan secara rutin dalam upaya mengurangi resiko bencana banjir. 2) Bentuk-bentuk mitigasi nonstruktural yang terdapat pada Masyarakat Desa Ngrombo yaitu kesadaran tentang Mitigasi bencana banjir dalam bentuk sosialisasi terhadap Masyarakat untuk meminimalisir dampak atau resiko bencana banjir jika sewaktu-waktu terjadi bencana banjir di Desa Ngrombo. 3) Bahwa tingkat kesiapan Organisasi Masyarakat dalam mitigasi bencana dinilai baik (Lukito;2014).

### **1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah**

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu, dimana konteks penelitian yang dilakukan yakni pelaksanaan mitigasi bencana kepada masyarakat untuk



pengecahan dan pengurangan dampak bencana, metode yang digunakan metodenya yang digunakan penelitian kualitatif dengan metode deskriptif dan pendekatan induktif juga berbeda dengan penelitian Gunawan, Afrizal, Jawoto dan Lukito. Selain itu pengukuran/indikator yang digunakan juga berbeda dari penelitian sebelumnya yakni analisis teori implementasi kebijakan Van Meter dan Horn (1975) dengan dimensi standar kebijakan, sumber daya, sikap pelaksana, komunikasi antara organisasi dan aktivitas pelaksana dengan mitigasi bencana.

### **1.5. Tujuan.**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi kebijakan beserta faktor penghambat dan upaya yang dilakukan dalam kebijakan mitigasi oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) bagi masyarakat terdampak banjir di Kabupaten Supiori Provinsi Papua.

## **II. METODE**

Penelitian ini metode yang digunakan penelitian kualitatif dengan metode deskriptif dan pendekatan induktif dan menganalisis data melalui reduksi data, data display/ penyajian data dan penarikan kesimpulan atau verifikasi (Conclusion Drawing atau Verification). Data diperoleh dengan teknik Triangulasi data yaitu menggunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Dalam melakukan pengumpulan data wawancara dengan teknik purposive sampling terhadap 7 informan yaitu Kepala BPBD, Kasubag tanggap darurat, Kasubag Umum, Satgas BPBD, Kepala Desa Syurdori, dan Masyarakat. Adapun analisis menggunakan teori implementasi dari Van Metter dan Van Horn (1975) yang digunakan untuk implementasi kebijakan dengan empat dimensi yakni Standard dan Tujuan Kebijakan, Sumber Daya Kebijakan, Komunikasi Antar Organisasi dan Penguatan Kegiatan, dan sikap pelaksana.

## **III. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Penulis menganalisis Implementasi kebijakan mitigasi oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah bagi masyarakat terdampak banjir di Kabupaten Supiori Provinsi Papua. Analisis menggunakan teori implementasi dari Van Metter dan Van Horn (1975) yang digunakan untuk implementasi kebijakan dengan empat dimensi yakni Standard dan Tujuan Kebijakan, Sumber Daya Kebijakan, Komunikasi Antar Organisasi dan Penguatan Kegiatan, dan sikap pelaksana.

### **3.1. Standar Kebijakan**

Penulis melakukan pengukuran terhadap tujuan, standar dan sasaran kebijakan. Pengukuran tingkat keberhasilan kinerja implementasi kebijakan dapat diukur melalui tujuan kebijakan di tingkat pelaksana kebijakan yang bersifat realistis dan sosiokultural. Jika ukuran dan tujuan kebijakan yang ada pada tataran implementasi terlalu ideal (utopsis). Sasaran yang jelas dan terarah sangatlah penting guna menyukkseskan program yang ingin dilaksanakan. Dimana rincian tujuan keputusan kebijakan umum berupa dokumen regulasi menuju penetapan standar yang lebih spesifik dan konkrit untuk mengevaluasi kinerja program.

Kebijakan mitigasi bencana pada Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 yang dilakukan oleh BPBD Kabupten Supiori saat ini dapat dikatakan cukup efektif tetapi belum maksimal karena proses pelaksanaan sosialisasi dan edukasi belum terlaksana dengan baik sehingga masyarakat masih belum sepenuhnya memahami tentang mitigasi standar penyelamatan dini dalam merespon kejadian bencana banjir yang terjadi di Desa Syurdori, Kecamatan Spiori Timur Kabupaten Supiori.

### **3.2. Sumber Daya**

Penulis melakukan pengukuran terhadap sumber daya. Keberhasilan implementasi kebijakan sangat tergantung dari kemampuan memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Manusia merupakan sumber daya yang terpenting dalam menentukan keberhasilan suatu implementasi kebijakan. Setiap menuntut adanya sumber daya manusia yang berkualitas sesuai dengan pekerjaan yang disyaratkan oleh kebijakan yang telah ditetapkan secara politik. Selain sumber daya manusia, sumber daya finansial dan fasilitas menjadi pertimbangan penting dalam keberhasilan implementasi kebijakan.

Sumber daya yang dimiliki BPBD yaitu sumber daya manusia, fasilitas dan finansial yang dimiliki oleh BPBD Kabupaten Supiori dalam menjalankan tugasnya belum cukup baik dan belum memadai sebagai penyelenggara penanggulangan bencana di daerah. Sumber daya manusia BPBD diketahui berjumlah 29 orang pegawai, 3 orang pejabat struktural, 6 orang pejabat fungsional dan 20 orang staf biasa SDM jujur saja kita belum maksimal dan belum memadai dalam penanggulangan bencana apalagi masyarakat. Sumber daya sarana dan prasarana yang dimiliki berupa mobil rescue 1 unit, tenda pengungsi 5 unit, dan perahu karet 1 unit.

Kekurangan sumber daya ini menyebabkan sulitnya pemerintah di dalam menetapkan status tanggap darurat. Begitu pun dengan pengangkatan personil yang dilakukan dibentuk hanya pada saat mendekati waktu bencana datang. Selain itu, pengangkatan personil yang didapatkan dari Badan Kepegawaian Daerah (BKD) pun kurang memiliki kompetensi dalam bidang kebencanaan sehingga masih perlu dilakukan pelatihan secara berkesinambungan untuk dapat terjun di lapangan, karena tidak dilatar belakangi oleh ilmu kebencanaan tetapi hanya menggunakan filling/insting dalam bekerja menanggapi kejadian bencana yang terjadi dan hal ini kurang efektif, dikarenakan dalam proses penanggulangan bencana tentunya harus memiliki latar belakang ilmu yang menjadi dasar seperti ilmu kebencanaan dan kemudian didukung oleh pengalaman agar proses penanggulangan bencana dapat berjalan dengan baik. Kemudian untuk segi finansial atau biaya masih merupakan bagian dari APBD Kabupaten Supiori Masih minimnya anggaran yang dialokasikan dalam APBD untuk mengatasi seluruh kejadian bencana di Kabupaten Supiori.

### **3.3. Sikap Para Pelaksana**

Penulis melakukan pengukuran terhadap sikap para pelaksana. Hal ini penting karena implementasi kebijakan akan sangat dipengaruhi oleh ciri-ciri yang tepat serta cocok dengan para pelaksananya. Hal ini berkaitan dengan konteks kebijakan yang akan dilaksanakan pada beberapa kebijakan pelaksanaan kebijakan yang ketat dan tegas. Pada konteks lain yang diperlukan agen pelaksana yang demokratis dan persuasif. Selain itu, coverage atau luas wilayah menjadi pertimbangan penting dalam menentukan agen pelaksana kebijakan.

Sikap para pelaksana atau pegawai/staf BPBD Kabupaten Supiori cukup sigap dalam merespon perintah dari atasan sesuai dengan keadaan baik dalam situasi darurat kebencanaan maupun dalam waktu senggang walaupun dengan keterbatasan yang ada, hanya mengandalkan salam tangguh yang dimiliki oleh BPBD kemudian semangat dari para pegawai/staf BPBD sehingga mereka cukup mampu melaksanakan penanggulangan bencana di daerah.

### **3.4. Karakteristik Organisasi dan Aktivitas Pelaksana**

Penulis melakukan pengukuran sikap penerimaan atau penerimaan dari agen pelaksana kebijakan sangat mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan publik. Hal ini sangat mungkin terjadi kebijakan yang dapat dilakukan untuk membuat keputusan dari pelaksana yang mengenal betul permasalahan dan karena masalah yang mereka rasakan dan berada di lapangan.



Tetapi kebijakan publik biasanya bersifat top down yang sangat mungkin bagi para pengambil keputusan tidak mengetahui bahkan tidak mampu menyentuh kebutuhan, keinginan atau permasalahan yang harus diselesaikan.

Karakteristik organisasi dan aktivitas pelaksana di BPBD Kabupaten Supiori belum efektif. Karakteristik organisasi BPBD ini adalah menanggulangi bencana dan aktivitas pelaksana merupakan pegawai/staf yang melaksanakan penanggulangan bencana di lapangan, belum adanya sinkronisasi dikarenakan agen Pelaksana tidak didukung dengan sarana dan prasarana yang mendukung dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Sedangkan jika dilihat Karakteristik organisasi BPBD ini adalah menanggulangi bencana dan aktivitas pelaksana merupakan pegawai/staf yang melaksanakan penanggulangan bencana di lapangan sehingga hal ini yang menyebabkan kurang efektifnya BPBD Kabupaten Supiori dalam melaksanakan penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah.

### **3.5. Mitigasi**

Mitigasi non struktural merupakan upaya mitigasi yang dilakukan selain pembangunan prasarana fisik. Artinya bentuk mitigasi ini bisa dilakukan lewat pembentukan peraturan oleh pemerintah, penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi bencana dan hal lainnya. Upaya mitigasi non struktural biasanya dilakukan di daerah rawan bencana dan sekitarnya. Tujuan dari mitigasi ini supaya masyarakat bisa tetap beraktivitas tanpa rasa takut berlebihan dan merasa nyaman serta aman.

Mitigasi non struktural yang dilakukan BPBD Kabupaten Supiori belum efektif dalam melakukan edukasi mitigasi bencana kepada masyarakat melalui sosialisasi kebencanaan dikarenakan BPBD tidak turun secara langsung kepada masyarakat dalam memberikan edukasi kebencanaan. Sosialisasi tentang kebencanaan dalam mitigasi bencana banjir oleh BPBD Kabupaten Supiori kepada masyarakat belum efektif dikarenakan sosialisasi yang dilakukan tidak secara langsung kepada masyarakat sehingga masyarakat belum memahami tentang bagaimana langkah-langkah awal dalam menyelamatkan diri dari bencana banjir yang terjadi.

### **3.6. Diskusi Temuan Utama Penelitian**

Pelaksanaan implementasi kebijakan mitigasi oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah bagi masyarakat terdampak banjir di Kabupaten Supiori Provinsi Papua masih belum baik sehingga masyarakat masih belum menerima manfaat dari kebijakan mitigasi ini. Mitigasi yang dilakukan oleh BPBD secara struktural dan non struktural masih belum baik berbeda halnya yang ditemukan (Lukito;2014) yang menyatakan bahwa mitigasi struktural dan nonstruktural untuk kesiapan Organisasi Masyarakat Desa Ngrombo dalam mitigasi bencana berjalan baik.

Pada aspek mitigasi, pencegahan bencana banjir tersebut masih ditemui permasalahan-permasalahan seperti pelaksanaan sosialisasi dan edukasi tentang mitigasi bencana banjir, pembuatan peta rawan bencana khususnya bencana banjir, pelaksanaan pemantauan rutin yang belum tampak oleh masyarakat serta pelatihan kesiapan belum dirasakan masyarakat sehingga pencegahan dan penanganan bencana belum dirasakan sepenuhnya oleh masyarakat sama halnya yang ditemukan (Afrizal & Jawoto; 2014) menemukan bahwa dalam ancaman banjir aspek Pengetahuan Prabencana belum begitu mengerti mengenai upaya kesiapsiagaan serta aspek pengetahuan mitigasi berupa tindakan mitigasi secara struktural.

Pada aspek penanganan darurat bencana banjir dalam mitigasi terlihat belum berjalan maksimal di sebabkan karena kurangnya personil / anggota BPBD yang ada yang belum terlalu turun membantu masyarakat saat terjadi bencana banjir, peralatan yang belum memadai seperti tenda dan perahu

yang masih kurang, sarana dan prasarana sewaktu terjadinya banjir belum sepenuhnya ada. Pada aspek mitigasi bencana banjir terlihat belum berjalan maksimal buktinya seperti koordinasi yang dijalankan antara pemerintah dan masyarakat belum berjalan dengan baik dan optimal guna menentukan titik rawan bencana, masih banyak yang belum dilakukan perehapan saluran pembuangan air/drainase. Perlunya penerapan metode sosialisasi yang lebih praktis sehingga masyarakat lebih mudah memahami. Jadi, Implementasi Kebijakan Mitigasi Bencana Banjir oleh BPBD Desa Syurdori Kabupaten Supiori masih belum optimal bahkan hampir sama sekali tidak dirasakan oleh masyarakat.

Pelaksanaan mitigasi bencana oleh BPBD masih dilakukan upaya meningkatkan Penyadaran dan Kapasitas Masyarakat melalui Sosialisasi edukasi Mitigasi bencana Banjir rutin setiap bulan dalam mengedukasi masyarakat tentang mitigasi bencana dan kawasan rawan bencana untuk meningkatkan kapasitas masyarakat untuk tangguh bencana. kemudian dilakukan peningkatan sumber daya manusia serta menambah sarana dan prasarana dalam menekan angka risiko bencana banjir seperti posko informasi bencana, pembuatan jalur drainase, dan rambu jalur evakuasi.

#### **IV. KESIMPULAN**

Penulis menyimpulkan bahwa implementasi kebijakan mitigasi oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah bagi masyarakat terdampak banjir di Kabupaten Supiori Provinsi Papua belum berjalan dengan maksimal, masih terdapat permasalahan dan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan tersebut. Hal ini ditandai dengan Pencegahan Bencana Banjir masih banyak ditemukan permasalahan. Hal itu menyebabkan kurang efektifnya BPBD Kabupaten Supiori dalam melaksanakan penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah sehingga hampir sama sekali tidak dirasakan oleh masyarakat. Permasalahan dalam mitigasi yaitu sumber daya manusia, sarana dan prasarana, dan kurangnya kesadaran masyarakat menyebabkan mitigasi belum berjalan dengan baik. Upaya BPBD Kabupaten Supiori melaksanakan mitigasi dalam menekan angka resiko bencana banjir yaitu meningkatkan kesadaran masyarakat melalui sosialisasi, meningkatkan sumber daya manusia, dan meningkatkan sarana prasana di desa maupun BPBD Kabupaten Supiori. Guna meningkatkan mitigasi disarankan untuk perlunya sosialisasi yang lebih praktis seperti pelaksanaan pembuatan peta rawan bencana banjir, pelaksanaan pemantauan rutin, pelatihan kesiapan yang dilakukan bersama masyarakat sehingga pencegahan dan penanganan bencana belum dirasakan seutuhnya oleh masyarakat dan koordinasi dan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat.

**Keterbatasan Penelitian.** Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu dan biaya penelitian. Penelitian juga hanya dilakukan pada satu wilayah di desa Syudori sehingga cakupannya masih tidak terlalu kompleks.

**Arah Masa Depan Penelitian (*future work*).** Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi yang lebih luas berkaitan dengan mplementasi kebijakan mitigasi oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah bagi masyarakat terdampak banjir di Kabupaten Supiori Provinsi Papua

#### **V. UCAPAN TERIMA KASIH**

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Kepala BPBD Kabupaten Supiori beserta jajarannya dan Kepala Desa Syurdori yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian.



## VI. DAFTAR PUSTAKA

Carl Van Horn dan Donal Van Meter , 1975, Model-model dalam Kebijakan Implementasi, yogyakarta

Fahrur Alfian Lukito, 2014, Mitigasi Bencana Banjir di Desa Ngrombo Kecamatan Baji Kabupaten Sukaharjo. Universitas Muhammadiyah Surakarta

Pratama, gunawan. 2017. ANALISIS PENANGGULANGAN BENCANA BANJIR OLEH BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD) KOTA BENGKUL. Universitas Bengkulu

Nurmansyah, A.N., & Setyono. J . S. (2014). Perubahan Kesiapsiagaan Masyarakat DAS Beringin Kota Semarang dalam Menghadapi Ancaman Banjir Bandang. Jurnal Wilayah dan Lingkungan

